

EXECUTIVE SUMMARY

HASIL KAJIAN

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN

SUMBERDAYA UKM DAN KOPERASI

TAHUN 2006



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2007**

Kemanfaatan Program Perkuatan Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM

Tahun 2006 ditutup dengan satu pernyataan Bank Dunia yang sangat mengejutkan bahwa “Seratus juta rakyat Indonesia berpenghasilan kurang dari 2 Dolar AS perorang per hari, atau menurut standart Bank Dunia mereka tergolong miskin”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa lebih kurang 40 % persen rakyat Indonesia tergolong miskin, dan tidak sama dengan apa yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang masih bertahan dengan angka kemiskinan sebesar 17,5 % (dengan standar BPS).

Kenyataan menunjukkan bahwa, walaupun keinginan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran menjadi prioritas pembangunan dari satu rezim, ke rezim, tetapi sampai sekarang ini masalah tersebut belum juga dapat dihilangkan. Sebagian pakar ekonomi meyakini bahwa kemiskinan dan pengangguran dapat dengan sendirinya terhapus dengan adanya pembangunan yang dapat menghasilkan pertumbuhan. Sedangkan sebagian meragukan pendapat tersebut dan mengatakan bahwa pertumbuhan akan mampu mengurangi kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja. Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya menjadi kendala untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran tersebut ?. Untuk menjawab hal ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melihat permasalahan yang sangat mendasar menyangkut masalah system dan pendekatan pembangunan.

Sumberdaya pembangunan yang paling besar dan paling potensial untuk dikembangkan sekarang ini adalah manusia. Sedangkan sumberdaya alam yang dalam empat dekade terakhir menjadi andalan utama yaitu minyak dan gas bumi serta hutan semakin menipis”. Namun demikian kenyataan memperlihatkan bahwa SDM yang tersedia bukanlah tenaga professional untuk kegiatan kegiatan usaha modern, tetapi mereka adalah kelompok besar dari pelaku usaha (99,9%) yang bergerak pada kegiatan usaha tradisional sampai dengan semi modern dengan skala usaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM). Nilai produktifitas kegiatan usaha kelompok ini relatif kecil, tetapi kemampuan penyerapan tenaga kerjanya cukup besar, sehingga kegiatan usaha UMKM dapat menyerap 96,7 % angkatan kerja.

Pengembangan kemampuan UMKM memang sudah menjadi prioritas dari Pemerintah, hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan pemberdayaan UMKM yang juga dikaitkan dengan pengembangan peran Koperasi. Perkuatan permodalan UMKM merupakan salah satu program yang diharapkan dapat mengatasi masalah rendahnya akses UMKM terhadap permodalan, karena

keterbatasan kemampuan UMKM (terutama usaha mikro dan kecil) untuk berhubungan dengan perbankan.

Hasil Pengamatan Lapangan Dan Analisis

Dari tahun anggaran 2004 sampai dengan 2006, Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah menyalurkan dana bantuan perkuatan untuk Usaha mikro dan Usaha Kecil (UMK) sebesar Rp 2,35 triliun, dan tahun 2007 akan dianggarkan tambahan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Program Perkuatan permodalan ini dilaksanakan dengan pola bergulir (revolving) dalam berbagai model pinjaman antara lain model konvensional melalui Unit simpan pinjam koperasi (USP) dan koperasi simpan pinjam (KSP), bantuan pinjaman sektoral dan sistem Syariah yang disalurkan melalui perbankan,

Hasil kajian terhadap 360 responden pada lima propinsi yaitu Sumatera Barat, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat dan Sulawesi selatan memperlihatkan bahwa :

- 1) Pada umumnya penerima Bantuan perkuatan adalah mereka yang sudah berusaha di suatu bidang usaha atau berpengalaman rata-rata 2,3 tahun.
- 2) Sebagian besar (68 %) tidak memiliki modal sendiri, tetapi menggunakan modal pinjaman dari pihak lain. Penghasilan yang diperoleh dari usaha yang dilaksanakan cukup menguntungkan dengan margin rata-rata 62,1 % dari modal per tahun.
- 3) Dengan adanya bantuan perkuatan sebesar Rp 3,394 juta, Omset usaha mikro dan usaha kecil (UMK) meningkat dari rata-rata Rp 44,429 juta, menjadi Rp 53,489 juta, atau rata-rata bertambah sebesar Rp 9,059 juta atau 20,91% per tahun.
- 4) Laba UMK meningkat dari rata-rata Rp 10,495 juta, menjadi Rp 13,436 juta per tahun, atau bertambah sebesar Rp 2.941 juta (27,68 %). Dengan jumlah pendapatan sebesar ini, tanpa adanya pendapatan dari sumber lainnya dengan asumsi UMK memiliki tanggungan sebanyak 4 orang, maka dengan standar bank Dunia (2 Dolar per orang per hari) mereka masih tergolong kelompok miskin. Pendapatan minimal standar Bank dunia bagi keluarga dengan 4 tanggungan lebih kurang 2.880 Dolar AS per tahun atau Rp 25,92 juta. Dari data ini dapat disimulasikan berapa dana yang diperlukan untuk memberdayakan UMK dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan
- 5) Pinjaman dari pihak ke tiga berpengaruh negative terhadap peningkatan omset UMK.

- 6) Omset usaha secara langsung mempengaruhi laba UMK. Dalam hal ini ada enam faktor yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba UMK yaitu ; Ketersediaan bahan baku lokal, Manajemen UMK yang baik, prosedur pemberian pinjaman yang mudah dan sederhana, Jumlah pinjaman yang mencukupi, kebebasan penggunaan pinjaman dan jenis usaha peminjam
- 7) Pinjaman dari pihak ke tiga (umumnya rentenir) dengan bunga yang tinggi, berpengaruh negative terhadap peningkatan laba UMK.
- 8) Jam Kerja UMK bertambah rata-rata 1,85 jam per hari, sedangkan rata-rata penambahan tenaga UMK sebesar 0,65 orang per UMK, atau untuk membuka satu lapangan kerja baru melalui pengembangan usaha UMK diperlukan dana sebesar Rp 2,985 juta. Dari data ini dapat disimulasikan berapa banyak diperlukan anggaran pengembangan UMK untuk mengatasi masalah pengangguran.
- 9) Penyerapan tenaga kerja oleh UMK dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : Pemilikan asset UMK, jumlah pinjaman program perkuatan, kebebasan penggunaan pinjaman dan, jenis usaha UMK.

Pembahasan

- 1) Penilaian kelayakan peminjam idealnya tidak hanya dinilai berdasarkan persyaratan-persyaratan administratif, tetapi lebih ditekankan pada potensi usaha UMK.
- 2) Pendistribusian kredit perdaerah yang menggunakan metoda proporsionalitas berdasarkan penjatahan perlu juga dilengkapi dengan pertimbangan dari aspek kebutuhan yang berorientasi pada jumlah UMK yang potensial di daerah tersebut
- 3) Kondisi perekonomian makro ditingkat Nasional/ internasional, kurang berpengaruh terhadap kegiatan usaha kelompok UMK, disebabkan : a) sebagian besar UMK menggunakan bahan baku lokal,
- 4) Selang waktu produksi UMK relatif singkat sehingga baik inflasi maupun tingkat bunga kurang dapat mempengaruhi pendapatan UKM serta
- 5) ICOR UMK relatif rendah sehingga dengan modal yang sedikit bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar dengan rata-rata margin per tahun lebih dari 30 %.

Rekomendasi Kebijakan

- 1) Perlu adanya penyempurnaan pendekatan dan pola pelaksanaan yang memungkinkan program bantuan perkuatan permodalan mampu menjangkau lebih banyak lagi UMK yang membutuhkannya.
- 2) Pemberdayaan UMK menyangkut semua aspek usaha, oleh sebab itu koperasi akan lebih bermanfaat jika mampu memberikan pelayanan dari semua aspek kebutuhan UMK. Untuk tujuan tersebut maka secara simultan koperasi juga harus diberdayakan.
- 3) Program-program perkuatan yang telah dilaksanakan sekarang ini apabila akan dilanjutkan maka harus dilakukan: a) Perbaikan dalam system administrasi pendistribusian dana, agar pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang lebih cepat; b) Pelaksanaan system perguliran dilakukan secara konsisten; c) Pemberian bantuan perkuatan kepada koperasi penyalur serta penyusunan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Kajian Model Penumbuhan Unit Usaha Baru

Permasalahan besar yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah kurangnya jumlah wirausaha dengan produktivitas dan daya saing yang tinggi. Upaya meningkatkan daya saing bangsa harus dimulai dari mengembangkan kewirausahaan dari para wirausahawan (pemilik dan pengelola unit usaha) yang telah ada serta menumbuhkan wirausaha atau minimal unit-unit usaha baru pada sektor-sektor yang produktif sesuai dengan potensi daerah. Pengembangan kewirausahaan juga diharapkan akan meningkatkan daya tahan bangsa, yang terbukti pada saat krisis ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mengandalkan bahan baku lokal dan memiliki keunggulan kompetitif mampu bertahan dan bahkan berkembang. Kewirausahaan menjadi kunci meningkatkan daya tahan dan daya saing ekonomi nasional pada masa mendatang.

Selama ini terdapat berbagai model penumbuhan unit usaha baru, baik yang dikembangkan oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah seperti: waralaba, kemitraan, pendampingan, inkubator, maupun pola pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi dan sekolah kejuruan. Sebagian besar wirausaha baru lahir dari kesulitan mencari pekerjaan; atau karyawan yang berpengalaman kerja melihat peluang usaha yang terkait dengan pekerjaannya lalu mendirikan unit usaha baru sebagai tambahan penghasilan. Hal ini yang menyebabkan UMKM yang baru di Indonesia selama ini umumnya bergerak di sektor yang jenuh dan kurang produktif karena pilihan sektor usaha didasarkan pada faktor ikutan (*demonstration effect*). Upaya menumbuhkan wirausaha baru yang berdaya saing dan berbasis iptek memerlukan sinergi kebijakan dan sumberdaya yang ada di masyarakat serta bersifat lintas sektoral dan lintas pelaku.

Kegiatan kajian bertujuan untuk mengetahui model-model penumbuhan usaha baru; mengetahui faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap penumbuhan unit usaha baru; dan menyusun rekomendasi model penumbuhan unit usaha baru yang efektif. Kegiatan ini termasuk dalam kelompok kegiatan *policy research* yang terdiri dari rangkaian kegiatan penelitian, sosialisasi, dan evaluasi kebijakan yang telah ada selama ini, serta merumuskan kebijakan dan model penumbuhan usaha baru yang efektif di Indonesia pada masa mendatang. Kajian dilakukan di enam propinsi yang masyarakatnya banyak melakukan kegiatan wirausaha dan mempunyai karakteristik budaya yang beragam. Lokasi penelitian yaitu : Kepulauan Riau, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat dan Gorontalo. Observasi lapangan akan ditekankan pada upaya

mengidentifikasi dan menganalisis model penumbuhan unit usaha baru yang sesuai dengan potensi ekonomi di daerah kajian.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu :

1. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara langsung dengan wirausaha dan responden lainnya. Dalam kajian ini, responden wirausaha dibedakan berdasarkan skala usaha dan asal daerahnya. Wirausaha juga dibedakan antara wirausaha mikro dan kecil yang berada di dalam sentra dan di luar sentra. Pada setiap sentra UKM dikumpulkan sekurang-kurangnya 5 responden. Perbedaan ini untuk melihat karakteristik wirausaha yang dikembangkan secara kolektif dan memperoleh dukungan pemerintah (sentra) dengan wirausaha yang di luar sentra.
2. Data dikumpulkan berdasarkan hasil observasi langsung kegiatan usaha UMKM, dan dilengkapi dengan wawancara dengan pihak yang mengenal wirausahawan (misalnya: pegawai, tetangga, saudara). Opini dan konfirmasi kepada responden ahli dan Dinas Koperasi dan UKM juga dilakukan di daerah survei untuk memastikan temuan adalah valid.
3. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang berkaitan dengan aspek kewirausahaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya, dan model penumbuhan unit usaha yang efektif di daerah survei.

Berdasarkan temuan yang diperoleh dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi model-model penumbuhan unit usaha baru yang ada di Indonesia mengindikasikan tidak ada model/pola/program penumbuhan unit usaha baru yang terbukti paling efektif berlaku secara umum, untuk setiap jenis usaha dan skala usaha. Setiap model/ pola/ program penumbuhan unit usaha baru hanya efektif untuk jenis dan skala usaha tertentu, dengan kondisi dan persyaratan tertentu.
2. Pola kekerabatan cukup efektif untuk menumbuhkan unit usaha baru pada skala usaha mikro dan kecil, terutama pada sektor industri makanan dan perdagangan eceran. Model penumbuhan unit usaha baru yang bersifat informal paling banyak dijumpai di Indonesia untuk menumbuhkan wirausaha baru berskala mikro. Sebagian besar usaha mikro tumbuh dari proses kekerabatan, alih profesi dari pekerja menjadi wirausaha dan unsur keterpaksaan karena kesulitan memperoleh pekerjaan, sehingga unit usaha mikro yang tumbuh umumnya memiliki produktivitas yang rendah.

3. Waralaba relatif cukup efektif untuk menumbuhkan unit usaha di sektor usaha makanan dan jasa. MLM cukup efektif untuk menumbuhkan unit usaha baru sebagai usaha sampingan kelompok pekerja dan ibu rumah tangga. Subkontrak dinilai cukup efektif untuk menumbuhkan UMKM baru di bidang industri pengolahan melalui efek ikutan sebagai industri penunjangnya, sehingga kemitraan usaha perlu terus didorong.
4. Program pemerintah melalui sentra UKM terbukti mampu menumbuhkan unit usaha baru dalam kisaran 10 – 25% per tahunnya, namun unit usaha yang tumbuh sering tidak sesuai dengan bisnis utama dari sentra tersebut.
5. Program Prospek Mandiri belum dapat dievaluasi secara memadai, karena program belum berjalan secara penuh. Program ini adalah program penumbuhan wirausaha yang bersifat langsung, namun perlu dibenahi desain programnya secara menyeluruh.
6. Program pemerintah melalui pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) ternyata cukup efektif untuk mendinamisasi penumbuhan usaha mikro di Gorontalo, sehingga pola ini dapat dikembangkan sebagai salah satu model penumbuhan wirausaha baru untuk ibu-ibu rumah tangga dan remaja putus sekolah. Program pelatihan kerja oleh Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja juga memberikan kontribusi positif untuk penumbuhan unit usaha baru.
7. Inkubator bisnis yang dikelola oleh perguruan tinggi umumnya kurang efektif untuk menumbuhkan wirausaha baru, karena umumnya: (1) kurang fokus dan hanya dianggap sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, (2) umumnya berbasis proyek, dengan sumber pendanaan dari APBN/APBD, sehingga jika tidak ada proyek maka kegiatan inkubasi menjadi mandeg, (3) tidak dikelola secara profesional dan hanya dijadikan sebagai wahana pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa, dan (4) umumnya tidak memiliki pengelola dan tenaga ahli yang berkomitmen secara penuh untuk memberikan layanan inkubasi bisnis. Asosiasi juga dinilai kurang efektif untuk menumbuhkan unit usaha baru, tetapi cukup efektif untuk menyalurkan aspirasi anggota dan sebagai wadah komunikasi untuk berbagi informasi.
8. Sistem pendidikan nasional yang berbasis pengetahuan belum mampu menstimulan peserta didik untuk memiliki pola pikir dan bertindak sebagai wirausaha. Pembelajaran yang berimbang antara aspek *hard skill*, *soft skill* dan pengalaman berbisnis terbukti memberikan dampak yang positif untuk menumbuhkan wirausaha baru di Indonesia. Perubahan sistem pendidikan kewirausahaan dapat menjadi landasan yang kuat untuk menumbuhkan wirausaha baru secara efektif pada masa mendatang.

9. Kemungkinan berusaha di Indonesia menurut persepsi responden sangat besar dan terbuka luas untuk dijadikan basis bagi penumbuhan wirausaha baru di Indonesia pada masa mendatang. Kemauan masyarakat untuk berwirausaha relatif cukup tinggi, yang didukung kemampuan teknis wirausaha dalam mengelola bisnisnya yang cukup memadai. Ketiga variabel di atas mengindikasikan kemungkinan berusaha di Indonesia seharusnya cukup besar, sehingga faktor penentu untuk mewujudkan kemungkinan masyarakat menjadi wirausaha adalah meningkatkan proses pemberdayaan masyarakat melalui pemberian dukungan perkuatan keuangan dan non-keuangan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
10. Koordinasi kebijakan lintas pelaku dan dukungan permodalan, serta perubahan sistem pendidikan nasional dinilai sebagai faktor penentu dalam meningkatkan efektivitas upaya memberdayakan masyarakat menjadi wirausaha. Revitalisasi Inpres tentang GNMMK dinilai dapat mempercepat upaya penumbuhan unit usaha baru di Indonesia pada masa mendatang, serta mengurangi program yang bersifat *hit and run*, karena menyulitkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya mengembangkan kewirausahaan di Indonesia.
11. Terdapat 6 model penumbuhan wirausaha baru yang dapat dijadikan pola dasar pengembangan kewirausahaan di Indonesia, yaitu: (1) model informal adalah model penumbuhan unit usaha baru untuk pemula tanpa pengalaman kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah; (2) model sarjana baru adalah model penumbuhan unit usaha baru untuk pemula tanpa pengalaman kerja dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi; (3) model pekerja adalah model penumbuhan unit usaha baru untuk karyawan yang masih bekerja; (4) model PHK adalah model penumbuhan unit usaha baru untuk karyawan yang mengalami pemutusan kerja; (5) model wirausaha – unggul adalah model penumbuhan unit usaha baru melalui pengembangan wirausaha yang memiliki produk unggulan dengan pola waralaba; dan (6) model duplikasi adalah model penumbuhan unit usaha baru melalui duplikasi wirausaha secara alami yang relatif cukup banyak dijumpai di Indonesia. Model pertama sampai kelima adalah kombinasi dari berbagai model penumbuhan wirausaha yang dinilai cukup efektif untuk menumbuhkan unit usaha baru sesuai dengan kondisi masyarakat yang akan dikembangkan sebagai wirausaha.

Berdasarkan kesimpulan di atas diajukan rekomendasi sebagai berikut :

1. Model informal dinilai efektif untuk menumbuhkan usaha mikro melalui pengembangan kelompok-kelompok usaha bersama dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat perguruan tinggi, serta penumbuhan wirausaha baru di kalangan masyarakat berpendidikan rendah-menengah. Kunci utama pengembangan model informal adalah perubahan sistem pendidikan nasional terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah, serta pemberian dukungan perkuatan keuangan melalui pengembangan sistem keuangan mikro di daerah secara merata, dan penataan kelembagaan kelompok dan koperasi.
2. Model sarjana baru dinilai efektif untuk menumbuhkan usaha kecil dan menengah yang berbasis pengetahuan dan teknologi serta memiliki produktivitas yang tinggi. Kunci utama pengembangan model sarjana baru adalah perubahan sistem pendidikan kewirausahaan di tingkat perguruan tinggi, sistem seleksi dan pelatihan peserta yang memadai disertai pendampingan dan mentoring dari kalangan pengusaha sukses, serta adanya dukungan perkuatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Model sarjana baru dapat dijadikan basis untuk menstimulan upaya penumbuhan unit usaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi serta berbasis Iptek.
3. Model wirausaha – unggul dinilai efektif untuk mempercepat pertumbuhan unit usaha berskala menengah dan besar di daerah melalui pengembangan UMKM yang memiliki produk unggulan untuk dikembangkan menjadi pewaralaba. Model wirausaha – unggul ini dapat dijadikan sebagai basis untuk pengembangan unit usaha yang berdaya saing tinggi di Indonesia pada masa mendatang. Kunci pengembangan model wirausaha – unggul adalah kemampuan mengidentifikasi UMKM yang memiliki produk unggulan, serta memiliki kapasitas untuk dikembangkan sebagai pewaralaba yang handal melalui pemberian dukungan perkuatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
4. Model pekerja dan model PHK dinilai efektif untuk menumbuhkan wirausaha baru dari kalangan pekerja atau pekerja korban PHK melalui pengembangan minat pekerja menjadi wirausaha baru dan peningkatan kapasitasnya sebagai pengusaha yang handal. Kelompok sasaran ini umumnya telah memiliki ketrampilan berbisnis, memiliki akses modal untuk memulai usaha, dan memiliki jejaring bisnis. Kunci pengembangan model pekerja dan model PHK ini adalah mengembangkan sistem informasi mengenai peluang-peluang usaha, mengembangkan forum yang mampu memotivasi pekerja beralih menjadi wirausaha, dan mengembangkan sistem yang dapat menurunkan risiko kegagalan berusaha.

5. Untuk meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat, maka pemerintah perlu merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mampu: (1) mempermudah perijinan untuk usaha mikro dan kecil, dan jika perlu menggantikan perijinan dengan pendaftaran usaha, (2) memberikan insentif fiskal bagi pengusaha pemula, usaha mikro dan kecil, serta usaha besar dan menengah yang bersedia bermitra dengan usaha mikro dan kecil, (3) merevitalisasi dan mengefektifkan Inpres Nomor 4/ 1995 tentang GNMMK, (4) mensinergikan dan mengkoordinasikan program penumbuhan unit usaha yang bersifat lintas pelaku secara konsisten dan berkelanjutan, (5) mengembangkan budaya bekerjasama dan kemitraan dengan mengembangkan sistem insentif yang menarik bagi pelaku usaha, dan (6) menjadikan program pengembangan kewirausahaan sebagai program prioritas di berbagai instansi pemerintah dan dunia usaha.
6. Untuk meningkatkan kemampuan teknis dan berbisnis di kalangan masyarakat terutama calon wirausaha melalui kebijakan yang mampu: (1) mengubah kurikulum pendidikan nasional dan sistem pendidikan yang berorientasi *hard skill* ke arah *soft skill* dan pengalaman berbisnis secara nyata, (2) merevitalisasi institusi pengembangan kewirausahaan, seperti: inkubator bisnis, BDS-P, Balai Latihan Kerja, dan sejenisnya, (3) merevitalisasi lembaga pelatihan ketrampilan melalui program akreditasi dan sertifikasi lembaga pelatihan, serta pola sistem insentifnya, (4) mendorong dunia usaha mengembangkan program kemitraan dengan dunia pendidikan, dan (5) mengembangkan kemitraan dunia usaha dengan usaha mikro dan kecil yang berbasis pada kepentingan bisnis dan *community development*.
7. Untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk berwirausaha dapat dilakukan melalui upaya: (1) menggalakkan sosialisasi dan kampanye pemasyarakatan kewirausahaan melalui berbagai media dan saluran komunikasi masyarakat, (2) memanfaatkan inovasi duplikasi untuk menumbuh-kembangkan wirausaha, (3) memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga tradisional serta organisasi kemasyarakatan untuk memberikan persepsi yang benar mengenai kewirausahaan, (4) menurunkan risiko usaha bagi pemula melalui program pendampingan dan mentoring usaha, dan (5) mengembangkan kondisi sosial-budaya-ekonomi untuk menumbuh-kembangkan kewirausahaan masyarakat.
8. Dukungan keuangan bagi usaha mikro dan kecil serta wirausaha pemula dapat mendorong penumbuhan wirausaha baru. Kebijakan dukungan keuangan yang mendesak dilakukan adalah: (1) penyederhanaan terminologi dan skema pembiayaan usaha yang dapat diakses oleh UMKM dan calon wirausaha, serta pengintegrasian secara lintas instansi, (2) pengembangan pasar keuangan

mikro melalui perkuatan lembaga keuangan mikro (KSP/USP/BPR) agar mampu memberikan layanan pembiayaan usaha yang memadai bagi UMKM, (3) membudayakan masyarakat terutama usaha mikro dan kecil untuk menabung agar mampu melakukan akumulasi modal, dan (4) mengembangkan manajemen pengelolaan keuangan usaha mikro dan kecil agar UMKM dapat mengatur dan mengalokasikan keuntungan usahanya sekitar 50% untuk kebutuhan rumah tangga, 30% – 40% untuk penambahan modal kerja, dan 10% – 20% untuk tabungan dalam rangka akumulasi modal.

9. Dukungan non-keuangan yang tepat berdampak merangsang perkembangan usaha UMKM secara berkelanjutan. Bentuk dukungan non-keuangan yang diperlukan untuk menumbuhkan unit usaha baru, antara lain: (1) mengidentifikasi dan mengembangkan UMKM yang prospektif untuk dikembangkan sebagai pewaralaba yang handal, (2) mempromosikan usaha waralaba UMKM, (3) memberikan akses informasi pasar dan berbagai peluang usaha, (4) memfasilitasi UMKM mengikuti kegiatan promosi usaha dan pameran, (5) memfasilitasi tempat dan sarana usaha bagi wirausaha pemula dengan batasan waktu tertentu, (6) revitalisasi program pengembangan sentra dan klaster bisnis UKM secara terintegrasi dan berkelanjutan, dan (7) memfasilitasi pengembangan teknologi dan pengembangan ketrampilan UMKM serta calon wirausaha.

Kajian tentang Eksistensi Koperasi Sekunder dan Keterkaitannya dengan Anggota

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah selama ini Koperasi-koperasi Sekunder baik Tingkat Nasional (Induk dan Gabungan) maupun Tingkat Propinsi (Pusat dan Gabungan) terus terbentuk dan bertumbuh dengan berbagai aktivitas. Namun sejauhmana eksistensi dan keterkaitan antara Koperasi Sekunder dengan Koperasi Primer anggotanya hingga sekarang belum diketahui pasti. Juga belum diketahui sejauhmana Koperasi Sekunder menjalankan fungsi-fungsinya kepada Koperasi Primer anggotanya, dan sebaliknya Koperasi Primer menjalankan kewajibannya kepada Koperasi Sekunder. Secara spesifik, permasalahan dalam penelitian ini adalah hanya mengetahui kondisi Koperasi Sekunder baik Tingkat Nasional maupun Tingkat Propinsi dan bagaimana hubungan atau keterkaitan antara Koperasi Sekunder dengan Koperasi anggotanya yang meliputi keterkaitan bisnis maupun aktivitas kelembagaan.

Aspek yang diukur dalam penelitian ini mencakup aspek keragaan yang terdiri dari keragaan kelembagaan dan keragaan usaha, dan aspek keterkaitan antar koperasi. Ada tujuh variabel-variabel yang termasuk dalam aspek keragaan kelembagaan, sedangkan keterkaitan antara Koperasi Sekunder dengan Koperasi anggotanya dapat dilihat dari sejauh mana Koperasi Sekunder melaksanakan fungsi-fungsinya kepada Koperasi Primer anggota. Fungsi-fungsi dimaksud dikelompokkan menjadi (1) fungsi kelembagaan, (2) fungsi usaha, dan (3) fungsi penunjang. Fungsi-fungsi tersebut merupakan hasil diskusi para pakar koperasi (*focus group discussion / FGD*).

Penelitian ini adalah penelitian survei dengan penarikan sampel berdasarkan metode *Purposive Sampling*. Responden penelitian ini adalah pengurus Koperasi Sekunder dan pengurus Koperasi Primer anggotanya. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari para responden melalui observasi dan wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari Kementerian Koperasi dan UKM, BPS Tingkat Nasional dan Daerah, Dinas Koperasi Tingkat Propinsi dan Kabupaten, dan masing-masing koperasi. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis keterkaitan dipergunakan metode kuantitatif yaitu metode *Chi-Square* (uji χ^2), dengan uji signifikansi dengan hipotesis nol/nihil (H_0) dan hipotesis tandingan/alternatif (H_1). H_0 berarti tidak ada keterkaitan antara Koperasi Sekunder dengan Koperasi Primer anggota. H_1 berarti ada keterkaitan antara Koperasi Sekunder dengan Koperasi

Primer anggota. H_0 diterima bila $\chi^2 \leq \chi^2_{\alpha}$ dan H_0 ditolak atau terima H_1 bila $\chi^2 > \chi^2_{\alpha}$; dengan derajat bebas tertentu. Analisis dilanjutkan dengan uji keeratan hubungan dengan menggunakan koefisien kontingensi. Penelitian ini dilaksanakan pada 9 propinsi masing-masing : Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kajian tersebut antara lain :

- Berdasarkan data pada Kementerian Koperasi dan UKM dan DEKOPIN, terdapat 53 Koperasi Sekunder Tingkat Nasional masih beroperasi secara hukum. Sesuai hasil penelitian, dari jumlah tersebut terdapat 56.60 % (30 koperasi) tidak aktif lagi dan juga tidak memiliki asset khususnya kantor, tanah dan bangunan, selebihnya sebanyak 43.40 % (23 koperasi) masih aktif.
- Dari 23 Koperasi Sekunder Tingkat Nasional yang masih aktif, diambil sampel sebanyak 39.13 % atau 9 koperasi. Dari jumlah sampel ini, sebanyak 55.55 % atau lima koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun dari tahun 2001 – 2005. Sedangkan empat koperasi lainnya hanya menyelenggarakan RAT sebanyak 2 tahun selama tahun 2001 – 2005.
- Sesuai data BPS, populasi Koperasi Sekunder Tingkat Propinsi pada 8 propinsi sampel kecuali DKI Jakarta, masing-masing Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, NTB, dan Kalimantan Barat, sebanyak 351 koperasi. Dari populasi ini, 82.86 % (261 koperasi) masih aktif, dan 17.14 % tidak aktif. Dari koperasi aktif, terpilih 33 koperasi (12.64 %) sampel. Sebanyak 69.70 % (23 koperasi) sampel sudah memiliki gedung kantor berstatus milik sendiri, sisanya 30.30 % (10 koperasi) menempati gedung kantor berstatus pinjaman dan sewa.
- Pada Koperasi Sekunder Tingkat Nasional :
 - (1) Tidak aktif dan anggotanya tidak aktif sebesar 52.83 % dari total populasi (53 koperasi);
 - (2) Aktif dan anggotanya aktif tetapi tidak ada keterkaitan sebesar 33.33 %;
 - (3) Aktif dan anggotanya tidak aktif berjumlah 0 (nol) % dari koperasi sampel, Kopersi Sekunder Tingkat Nasional aktif dan anggotanya juga aktif dan ada keterkaitan namun keterkaitannya lemah sebanyak 11.11 %.
 - (4) Aktif dan anggotanya aktif, dan ada keterkaitan dan keterkaitan tersebut kuat, sebanyak 55.56 %.

- Koperasi Sekunder Tingkat Propinsi :
 - (1) Aktif dan anggotanya aktif dan ada keterkaitan namun keterkaitannya lemah sebanyak 100.
 - (2) Aktif dan anggotanya aktif, dan ada keterkaitan dan keterkaitan tersebut kuat, sebanyak 0 (nol) %.

Adapun rekomendasi dari kajian ini adalah bahwa selama ini kegiatan pembinaan yang dilakukan pemerintah kepada koperasi lebih bertumpu kepada Koperasi Primer, sementara pembinaan kepada Koperasi Sekunder Tingkat Nasional dan Tingkat Propinsi masih terabaikan. Untuk mendorong pertumbuhan koperasi secara lebih baik dan untuk menjaga citra positif koperasi, pola pembinaan pemerintah perlu juga mencakup Koperasi Sekunder Tingkat Nasional dan Propinsi.

Penyusunan Berbagai Model dan Potret Koperasi Percontohan

Stereotipe terhadap keberadaan lembaga koperasi masih berkumandang diberbagai kalangan. Tudingannya pun sungguh tidak mengenakkan dimana koperasi dinilai sebagai lembaga ekonomi yang hampir gagal, tidak efisien dan tidak bersaing. Namun demikian, fakta menunjukkan ditengah hiruk pikuk persaingan yang semakin ketat, sekelompok masyarakat masih teguh bergabung dengan koperasi, baik di perkotaan, pedesaan, bahkan sampai daerah terpencil.

Penelitian ini dilakukan terhadap berbagai ragam perkoperasian dengan antipologi daerah perkotaan, perdesaan dan daerah terpencil. Dari hasil pengamatan lapangan, terhimpun 69 unit koperasi yang diambil dari 12 propinsi. Melalui analisis deskriptif dimuat deskripsi kelembagaan, usaha dan kiat-kiat pengelolaannya yang disusun menjadi sebuah buku dengan judul “ **Berlayar Mengarungi Sejuta Tantangan**”. Dengan demikian, perlahan-lahan sterotipe masyarakat terhadap koperasi makin berkurang, bahkan menjadi benchmarking bagi anak bangsa untuk membangun ekonomi rakyat melalui kebersamaan dalam wadah koperasi. Koperasi tersebut dinilai layak sebagai contoh dan model bagi pelaku ekonomi rakyat lainnya dalam mengembangkan koperasi sesuai dengan potensi dan tipologi daerah yang bersangkutan.

Koperasi daerah perkotaan meliputi : (1) Koperasi Keluarga Guru Jakarta (KKGJ), (2) Kopwan Setia Bhakti Wanita, Surabaya, (3) KSU Tunas Jaya, Jakarta, (4) KSP Wirakarya Jaya, Jakarta, (5) Kopkar PT. Sinar Sosro, Jakarta, (6) Primkopau Mabes TNI-AU, Jakarta, (7) Kopdit Sehati, Jakarta, (8) KSP Nasari, Semarang, (9) Koperasi Intako, Sidoarjo, (10) Koppas Kumbasari, Denpasar, (11) Kopdit Mandiri, Tebing Tinggi, (12) KSP Kartini, Kaliurang, (13) Koperasi Guru-guru Payakumbuh, Sumbar, (14) Kosudgama, Yogyakarta, (15) KSP Setia Kawan, Prambanan, (16) Kopwan Putri Lestari, Sulut, (17) KSP Syariah BMT Barrah, Bandung, (18) Kopwan Mekar Saluyu, Subang, (19) Koperasi Sasakdana, Garut, (20) Kopwan Permata, Kuningan, (21) Koperasi Pengangkutan Umum Medan, (22) Kopinkra Sutra Ayu, Pekalongan, (23) Koperasi Pengusaha Batik Setono, Pekalongan, (24) KPRI Daspin, Pekalongan, (25) Koperasi Wanita Patra, Cilacap, (26) KSP Artha Prima, Ambarawa, (27) KPRI Bhakti Praja Semarang, (28) KSP Karya Niaga, Demak, (29) KPRI Harapan, Mojokerto, (30) Kopdit Sawsti Sari, Kupang, (31) KSU Wanita Cendana, Kupang, (32) KSU Karyo Ando, Kupang, (33) KPN Maju, Kupang, (34) KPRI Tut Wuri Handayani, Pontianak, (35) KSU Kuta Mimba, Legian, Kuta, (36) KSP Citra Mandiri, Denpasar, (37) Kopti Makmur,

Denpasar, (38) KPN Kamadhuk RSUP Sanglah, Denpasar, (39) KPRI “Pendidikan” Diknas, Sulut, (40) Kopkar Mercury, Padang, (41) KSU Kenanga, Padang, (42) KPRI Pemkot Padang, (43) Koppas AIPT, Padang Panjang, (44) Kopkar Putra Rajawali, Gresik, (45) Kopegtel Mojokerto, (46) Kopwan Citra Lestari, Malang. **Koperasi daerah pedesaan** meliputi : (47) Koperasi SAE Pujon, Malang, (48) KUD Trisula, Majalengka, (49) Koppontren Al-Ishlah, Cirebon, (50) KUD Mintorogo, Demak, (51) KUD Tamporok, Minahasa Utara, (52) Pusat KUD Jatim, Surabaya, (53) KUD Penebel Tabanan, (54) KUD Kandangan, Simalungun, (55) Koperasi Petani Tebu Rakyat “Sumber Manis”, Mojokerto, (56) KUD Pringgodani, Demak, (57) KUD Mino Saroyo, Cilacap, (58) Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KSPBU), (59) KUD Maayan, Minahasa Selatan (60) KSP Bersehati, Minahasa, (61) KUD Mina Karota, Kupang, (62) Koperasi Susu Warga Mulya, Sleman, (63) Koppontren Ustmani, Malang, (64) KUD VII, Kota Talago I, Lima Puluh Kota. Adapun **koperasi daerah terpencil** meliputi : (65) KSU Cipta Mandiri, Pulau Buru, (66) KUD Senyum Hutumuri, Ambon, (67) KUD Pelita Makmur, Maluku Tengah, (68) KSU Karya Ampuh, Pontianak, (69) KSU Setara, Kupang.

Kajian Isu-Isu Strategis/Aktual Perkoperasian

Secara umum masalah yang dihadapi koperasi adalah masih adanya citra bahwa koperasi tidak efisien, daya kreasi, partisipasi, inovasi, dan kewirausahaan belum memadai, terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya modal, belum siap memasuki pasar, terbatasnya kemampuan dalam mengakses teknologi dan informasi, rendahnya disiplin dan etos kerjanya, dan masalah organisasi atau manajemen yang lain. Disamping itu kebijakan serta pembinaan dari pemerintah belum mampu memberikan sentuhan dan iklim yang kondusif, sehingga secara totalitas masalah-masalah diatas mempengaruhi tingkat efisiensi, produktivitas, dan pelayanan terhadap anggota.

Kegiatan ini berupa diskusi mengkaji isu strategis tentang perkoperasian, dimana data/informasi yang dikaji sangat penting, datanya valid, actual, factual, *reliable*, dan lingkupnya luas dalam arti menyangkut hajat hidup orang banyak serta aktual yaitu isu yang benar-benar terjadi yang efeknya pada koperasi, anggota dan masyarakat. Kegiatan ini mencakup: (1) melakukan pengkajian dan pengembangan tentang kelembagaan koperasi, (2) penelitian dan pengembangan tentang usaha perkoperasian, (3) penelitian dan pengembangan kemitraan antara koperasi dengan usaha besar dan antara koperasi, (4) penelitian dan pengembangan tentang pembiayaan dan pemasaran .

Hasil kegiatan ini berupa hasil kajian dan rekomendasi antara lain :

- (1) Akselerasi Peningkatan Kualitas Koperasi dalam Era Globalisasi Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2000-Koperasi);
- (2) Konsep Dasar Program Peranan Koperasi dalam Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL-BUMN).

Akselerasi Peningkatan Kualitas Koperasi dalam Era Globalisasi Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2000-Koperasi)

Sebagai organisasi yang berkembang di masyarakat, koperasi tidak terlepas dari dinamika perubahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Koperasi dituntut untuk selalu melakukan penyesuaian tatanan kegiatan usahanya, baik proses produksi, pelayanan maupun strategi pemasaran agar dapat bersaing dalam lingkungan baru. Kapasitas manajemen yang diperankan oleh pengurus dituntut bergerak lebih efisien dan efektif dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Guna mengantisipasi hal tersebut perlu adanya upaya-upaya pengelolaan koperasi yang selain akuntabel juga lebih adaptif dengan tuntutan masyarakat.

Standar mutu merupakan *komitmen* terhadap spesifikasi, jenis dan kriteria jasa/layanan yang disampaikan kepada anggota/*customer*/masyarakat guna memenuhi kebutuhannya. Seperti halnya produk-produk atau jasa yang dapat diterima oleh *customer*, maka jasa yang ditawarkan oleh koperasi seyogyanya mengacu pada *standar-standar* yang dapat diakui baik secara nasional maupun *internasional*, sehingga pada tahapan selanjutnya, sistem yang digunakan dalam pengelolaan koperasi memiliki ketangguhan dan efektivitas dalam memasuki era persaingan bebas. Sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 yang merupakan *seri standar yang dipublikasikan oleh International Organization for Standardization* dapat dijadikan alternatif pilihan, dimana produk/jasa yang ditawarkan, dikelola dengan sistem standar, transparan dan akuntabel sehingga masyarakat sebagai stakeholder diberi jaminan bahwa mutu produk dan mutu jasa yang dihasilkan telah memenuhi harapan. Namun demikian, **mengingat koperasi merupakan organisasi yang spesifik, maka tidak serta merta standar ISO 9001:2000 umum tersebut dapat diterapkan**, untuk itu **perlu penyesuaian mengacu pada jati diri koperasi**.

Program sertifikasi ISO 9001:2000 pada koperasi dilakukan dengan tujuan untuk : (1) memastikan penerapan sistem manajemen koperasi berbasis persyaratan yang ditetapkan oleh anggota dan pelanggan, pemenuhan persyaratan produk/jasa, perbaikan berkelanjutan; (2) meningkatkan *brand image* (citra) koperasi dikalangan dunia usaha baik domestik maupun internasional; (3) meningkatkan komitmen pihak-pihak yang terkait didalam koperasi sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Untuk dapat berhasil dan bermanfaat dalam meningkatkan kinerja koperasi, terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan acuan dalam penerapan sistem manajemen mutu di koperasi, yaitu: (1) Pelaksanaan demokrasi dalam organisasi diambil melalui RAT, (2) Mengutamakan pemenuhan persyaratan dari pelanggan

(anggota dan non anggota), (3) Kepemimpinan yang visioner, (4) Partisipasi anggota dan karyawan, (5) Pendekatan proses, (6) Pendekatan sistem dalam manajemen, (7) Pendekatan faktual dalam pengambilan keputusan, (8) Perbaikan yang berkesinambungan, (9) Hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok.

Beberapa manfaat dan keuntungan dalam menerapkan sistem manajemen mutu antara lain : (1) Mendorong perbaikan kinerja koperasi secara terus menerus: (2) Meningkatkan kepuasan pelanggan (anggota dan non anggota), (3) Meningkatkan komitmen, partisipasi dan kepuasan karyawan, (4) Hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok (suplier), (5) Meningkatkan kepercayaan masyarakat, (6) Meningkatkan daya saing koperasi, (7) Mengembangkan jejaring koperasi baik vertikal maupun horizontal.

Konsep Dasar Program Peranan Koperasi dalam Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL-BUMN)

Untuk mengatasi permasalahan sosial-ekonomi, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya termasuk dibidang ketenagakerjaan antara lain melalui program padat karya, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bantuan langsung tunai serta penyederhanaan prosedur investasi. Program-program ini selaras dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warganegara Indonesia berhak mendapatkan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak. Harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja di dalam negeri, sehingga masyarakat berupaya mencari kerja di luar negeri.

Ditengarai persoalan mendasar yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah lemahnya kemampuan finansial pencari kerja untuk membiayai proses pengiriman TKI ke luar negeri dan terbatasnya ketrampilan yang dimiliki. Pada umumnya, para pencari kerja adalah komunitas pengangguran karena berbagai penyebab seperti sempitnya lapangan kerja di daerah asal, tidak memiliki lahan, akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), rendahnya ketrampilan yang dimiliki, dlsbnya, semuanya bermuara kepada ketidakmampuan membiayai dirinya sendiri untuk mencari kerja di luar daerah asalnya, karena tingkat penghasilan yang tidak menentu.

Fakta empirik tersebut perlu diantisipasi dengan langkah terobosan dalam bentuk fasilitasi akses sumber dana atau pembiayaan yang efisien dan terjangkau oleh pencari kerja. Dana dimaksud, diarahkan tidak saja untuk mengatasi biaya pengiriman ke luar negeri tetapi juga untuk memberikan bekal ketrampilan sesuai jenis pekerjaan yang diinginkan. Salah satu diantaranya adalah melalui pendayagunaan penyisihan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 1-3 persen setiap tahunnya. Dana dimaksud akan menjadi sumber pembiayaan pokok bagi program pengiriman TKI ke luar negeri dengan mengikutsertakan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK). Sebagai landasan dari paradigma tersebut antara lain Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan Keputusan Bersama antara Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dengan Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah, tanggal 6 April 2005. Nomor : KEP-18/MBU/2005
02/SKB/M.KUKM/IV/2005
tentang Optimalisasi Pengelolaan Dana Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.

Program dimaksud akan menjadi wujud konkrit komitmen Pemerintah dalam mengembangkan UMKK untuk berperan serta secara aktif memacu pertumbuhan ekonomi melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Pada gilirannya UMKK akan termotivasi untuk menjadi badan usaha yang tangguh, mandiri dan profesional sambil membentuk hubungan kemitraan dan keterkaitan usaha dengan badan usaha lainnya.

Tujuan program : (1) Mengoptimalkan kapasitas usaha UMKK untuk berperan serta dalam mengatasi sebagian dari masalah ketenagakerjaan melalui pengiriman TKI ke luar negeri; (2) Memperluas aktivitas usaha UMKK agar menjadi badan usaha yang tangguh, mandiri dengan memanfaatkan dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL-BUMN), dan (3) Mendukung upaya Pemerintah dalam hal perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi UMKK.

Pola pelaksanaan koperasi dalam usaha jasa pengiriman TKI dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) pola yaitu : (1) **Pola I**; Koperasi sebagai Penyedia TKI Terlatih (Rekrutmen); (2) **Pola II**; Koperasi Menyediakan Pelatihan dan Dukungan Modal Bagi TKI; (3) **Pola III**; Koperasi Menyediakan Pelatihan dan Dukungan Modal Bagi TKI dengan PPTKIS sebagai Avalis; (4) **Pola IV**; Pola Dana Bergulir.

Program pengiriman TKI ke luar negeri ini hakekatnya memberdayakan UMKK, sekaligus membuka lapangan kerja dan dampaknya mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Berkenaan dengan hal tersebut untuk mengimplementasikan penyaluran TKI ke luar negeri melalui koperasi/KUD dan PPTKIS mutlak diperlukan keterpaduan instansi terkait dan jika diperlukan diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Negara Koperasi & UKM, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

Kajian Isu-Isu Strategis Pemberdayaan UKMK

Kegiatan ini bertujuan untuk : 1) Merespon dan mencari pemecahan terhadap permasalahan atau persoalan yang sedang dihadapi UMKM, dan 2) Memperoleh masukan dalam mengkaji ulang dan memantapkan peran UMKM dalam mendukung perekonomian Nasional. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah memperoleh masukan yang dapat dijadikan bahan acuan bagi pimpinan Kementerian Koperasi dan UKM serta Stake holder lainnya dalam merespon berbagai masalah actual sehubungan dengan pemberdayaan UMKM yang bersifat multidimensi

Selama tahun 2006 telah dilaksanakan sebanyak 8 kali diskusi yang dihadiri oleh orang-orang yang berkompeten sebagai nara sumber. Hasil diskusi dirumuskan oleh tim perumus yang selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan. Rangkaian kegiatan diskusi ini telah dapat diselesaikan pada akhir November 2006. Semua kegiatan diskusi dilaksanakan dilingkungan Deputi Pengkajian Sumberdaya UKMK Jln. MT. Haryono, Jakarta Selatan. Peserta diskusi terdiri dari pejabat instansi/lembaga pemerintah terkait, para peneliti dan pemerhati UKMK, LSM yang peduli dengan perkembangan UKMK dan koperasi, para pelaku usaha dan gerakan koperasi.

1. Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Terhadap Bisnis UMKM

Beberapa rekomendasi dari hasil diskusi yang telah disampaikan kepada Bapak Menteri sebagai bahan pertimbangan untuk dikemukakan dalam Sidang Kabinet, antar lain:

- a. Kenaikan TDL diharapkan dalam kisaran yang wajar 5-15% mengingat UKM baru menghadapi dampak kenaikan BBM dan Upah Buruh. Bila kenaikan melebihi angka 50 % maka akan berdampak pada pertumbuhan pengangguran diperkirakan 2-3 %, terutama untuk industri rotan, mebel, furniture, salon, bengkel, makanan dan minuman serta garmen.
- b. Mengingat UKM baru menghadapi dampak kenaikan BBM dan Upah Buruh, maka sekiranya pemerintah tetap menaikkan TDL seyogyanya ditunda paling cepat 3 bulan mendatang agar UKM punya waktu longgar merekstukturisasi ulang struktur biaya produksinya.
- c. Pemerintah kiranya perlu memikirkan keluwesan bagi UKM dalam mengakses modal kerja untuk mengeliminir kebutuhan pembiayaan bagi modal kerja akibat

kenaikan TDL. Bilamana hal ini tidak diperhatikan maka UKM akan banyak yang gulung tikar.

2. Rekayasa Lembaga Keuangan Dalam Mendukung Penyediaan Bahan Baku Bagi UMKM

Beberapa rekomendasi dari hasil diskusi yang telah disampaikan kepada Bapak Menteri sebagai bahan pertimbangan adalah :

- a. Gagasan ini walaupun sederhana, tetapi cukup baik dan perlu direspon, karena masalah yang dikemukakan merupakan hal krusial yang selama ini masih sulit dicari jalan keluarnya.
- b. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah studi pendalaman dan sekaligus menyusun studi kelayakan tentang lembaga penyangga pendanaan untuk menanggulangi kebutuhan bahan baku bagi UMKM di daerah.
- c. Merintis upaya ke arah pengembangan lembaga penyangga/pendanaan untuk menanggulangi kebutuhan bahan baku UMKM pada satu kabupaten/kota. Apabila memungkinkan kegiatan ini akan dilakukan pada tahun 2006.
- d. Membuat pilot proyek yang bersifat multi years penerapan lembaga penyangga/pendanaan untuk menanggulangi kebutuhan bahan baku bagi UMKM pada beberapa kabupaten/kota. Kegiatan ini diupayakan dapat dilakukan pada tahun 2007.
- e. Perlu diskusi dan desk research mendalam yang mengikutsertakan lembaga-lembaga yang sudah melakukan rekayasa untuk pendanaan bagi UMKM sebagai langkah pendahuluan untuk pengkajian.

3. Batas-Batas Negatif Terhadap Penanaman Modal Asing

Dari hasil diskusi yang dilakukan maka beberapa rekomendasi yang perlu sebagai bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti oleh Deputi Pengkajian Kementerian Koperasi dan UKM adalah :

- a. Untuk menanggapi hasil diskusi panel tersebut secara komprehensif diperlukan kajian lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan terkait dan bagaimana implementasi di lapangan dan dampaknya terhadap pemberdayaan UKM.

- b. Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan diatas sebaiknya dibentuk Tim kecil yang terdiri dari unsur Deputi II, IV dan peneliti Deputi VII. Tentatif anggota Tim diusulkan
 - 1) Dr. Ir. Riana Panggabean, MS (Ketua)
 - 2) Ir. Prijadi Atmadja, MBA (Wakil Ketua)
 - 3) Drs. Suharno Setin, MM
 - 4) Ir. Emilia Suhaimi, MM
 - 5) Dr. Burhanudin, R, MA
- c. Tim kecil akan melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa berbagai bahan yang terkait dengan pemberdayaan UKM di bidang jasa pelabuhan.
- d. Kegiatan ini hendaknya dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan untuk mendukung pembiayaan dialokasikan dari kegiatan pengkajian isu-isu strategis.
- e. Hasil temuan akan dibawa dalam rapat koordinasi dengan departemen/instansi terkait untuk menemukan solusi yang bisa disepakati dan diterima semua pihak dalam pemberdayaan UKM di bidang jasa pelabuhan.

4. Diskusi Menyorot Aspek Hukum dan Bisnis Pengembangan Pasar di DKI Jakarta.

Adapun beberapa rekomendasi hasil diskusi yang telah disampaikan kepada pimpinan adalah :

- a. Ekspansi pasar-pasar modern sudah membahayakan kehidupan pasar-pasar tradisional. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil temuan AC Nielson (2004) yang menyatakan pertumbuhan pasar tradisional -8,1% per tahun, sementara pertumbuhan pasar modern meningkat 31,40% per tahun. Keadaan ini perlu diantisipasi untuk pengembangan pengusaha tradisional. Jika tidak, maka pengusaha tradisional akan hilang dengan pertumbuhan yang semakin menurun.
- b. Banyak dasar hukum yang sudah dibuat untuk menata pasar tradisional, ternyata dasar hukum tersebut belum mampu menata pasar dalam struktur yang adil antara pedagang modern dengan pedagang tradisional. Banyak kebijakan yang tidak bisa dioperasionalkan dilapangan . Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) UU Persaingan Usaha belum dapat dijadikan alat untuk melindungi UKM karena belum adanya PP yang mengatur antara persaingan UKM dengan UB, sehingga KPPU belum dapat berbuat banyak. Menegkop dan UKM diharapkan segera mendesak pemerintah mengeluarkan PP Persaingan Usaha.
 - 2) Menegkop dan UKM bersama-sama dengan KPPU, Pemda DKI dan instansi terkait perlu melakukan diskusi yang lebih mendalam untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pedagang pasar tradisional di Jakarta.
 - 3) Dinas Koperasi dan UKM DKI bersedia untuk menjembatani pertemuan pedagang pasar dengan Gubernur DKI. Hal ini perlu disambut baik oleh pedagang pasar dan APPSI dan perlu dimonitor pelaksanaannya.
- c. Untuk memperkuat posisi tawar pedagang pasar tradisional dan mencari solusi permasalahannya maka diperlukan adanya : 1) kajian akademis yang bertujuan untuk melihat permasalahan secara objektif; 2) perlu adanya Tim Interdep untuk menyamakan persepsi dalam melihat permasalahan dan pelaksanaan berbagai peraturan yang telah dikeluarkan.
- d. Khusus mengenai Pasar Tanah Abang yang sedang bermasalah, perlu diidentifikasi secara kuantitatif seberapa besar kerugian yang ditanggung pedagang tradisional tersebut akibat peremajaan pasar Tanah Abang. Pasar ini perlu dilestarikan dan dilindungi mengingat aktivitas pasar ini terkait dari hulu sampai ke hilir dan mempunyai potensi sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.. Misalnya pengusaha batik Tanah Abang terkait dengan pengrajin di Pekalongan dan Tasik Malaya dan juga dengan jenis usaha lain. Seorang pengusaha (satu toko) mampu menyerap 50 orang tenaga kerja langsung. Jika jumlah pedagang saat ini ada sekitar 3050 maka serapan tenaga kerja sebanyak 152.500 orang.
- e. Untuk mewujudkan pasar tradisional yang bersih, aman dan tertata dengan baik, perlu dilakukan sosialisasi kepada pedagang dan stakeholders lainnya. Dalam hal ini kerjasama antara Koppas dan pengurus pasar perlu ditingkatkan.
- f. Masalah pedagang kaki lima perlu dipecahkan secara tuntas. Para pengusaha menyarankan agar (1) ada perwakilan pedagang/pelaku usaha pada Badan Sertifikasi Profesi yang bertugas untuk memberi masukan kepada pemerintah, (2) pembinaan pedagang kaki lima perlu dilaksanakan secara terpadu melalui satu pintu

5. Diskusi Komparasi Pola Kredit Mikro dan Grameen Bank.

Adapun beberapa rekomendasi hasil diskusi adalah

- a. Kredit mikro baik di Bangladesh (Grameen Bank) maupun di Indonesia, merupakan fasilitas kredit yang disediakan oleh lembaga pemerintah maupun nonpemerintah untuk masyarakat miskin atau kepada individu/kelompok usaha sangat kecil (mikro). Grameen Bank hingga Oktober 2006 melalui 2.256 kantor cabang telah melayani 6.737.047 anggota (96% adalah perempuan) dengan total outstanding kredit sebesar US \$ 475,13 juta dengan tingkat pengembalian 98,91%.
- b. Di Indonesia, ada sebagian lembaga keuangan mikro yang mengklaim bahwa mereka telah mereplikasi konsep Grameen Bank. Namun jika diperhatikan konsep yang dikembangkan tersebut tidaklah sama dengan Grameen Bank, karena yang direplikasi hanya beberapa aspek saja seperti : tidak menggunakan agunan; dan menggunakan sistem kelompok.
- c. Beberapa bantuan perkuatan Manekop dan UKM yang mempunyai kemiripan dengan pola kredit mikro diantaranya dana bergulir konvensional pola syariah. Bantuan perkuatan ini cukup populer dan digemari masyarakat pedesaan.
- d. Perlu dibuatkan payung hukum kredit mikro, baik dalam bentuk UU ataupun Perpres. Selain itu, perlu pula dinyatakan secara tegas yang diberikan tugas untuk melakukan koordinasi kredit mikro, apakah Menko Perekonomian atau Menekop dan UKM.
- e. Grameen Bank sangat sesuai untuk pemberdayaan UKM di Indonesia. Bank Dunia telah menyediakan Anggaran sebesar \$US 2 juta untuk mereplikasi konsep Grameen Bank di negara-negara berkembang. Untuk itu, dalam rangka menyusun replikasi konsep Grameen Bank di Indonesia diperlukan adanya kajian yang komprehensif.
- f. Sebagai tindak lanjut dari kajian tersebut perlu dilakukan kontak langsung antara Menekop dan UKM dengan Bank Dunia agar mendapatkan bantuan hibah untuk mereplikasikan program Grameen Bank di Indonesia.

6. Diskusi Kompetensi Kewirausahaan dalam Pengembangan Unit Usaha Baru.

Adapun beberapa rekomendasi hasil diskusi adalah :

- a. Kompetensi kewirausahaan merupakan unsur strategis yang mengakselerasikan antara SDM dengan bidang usaha yang dilakukannya. Penyesuaian antara kompetensi SDM dengan bidang usaha seharusnya menjadi bahan pertimbangan sebelum seseorang melaksanakan suatu kegiatan usaha. Namun karena kelemahan SDM UKM maka pembinaan, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan untuk tujuan tersebut masih diperlukan.
- b. BDS sebagai lembaga intermediasi merupakan unsur strategis dalam mendukung pengembangan sumberdaya UMKM. Karena itu, BDS perlu ditingkatkan kompetensinya untuk melahirkan UKM yang andal.
- c. Kesamaan visi dan persepsi tentang kompetensi kewirausahaan perlu dibangun di lingkungan Menegkop dan UKM dan instansi terkait agar tercipta kesepahaman dan kesamaan langkah dalam sosialisasi dan penerapan di lapangan.
- d. Pada tahun 1997 telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor: 4/1997 Tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GMMK), yang belum pernah dilakukan evaluasi pelaksanaannya. Oleh sebab itu, masih relevan dikaji ulang untuk pengembangannya yang disesuaikan dengan kondisi era reformasi sekarang.

7. Diskusi Pengembangan Klaster Bisnis Berbasis Agribisnis

Adapun beberapa rekomendasi hasil diskusi adalah:

- a. Pembentukan sentra dan klaster bisnis idealnya terjadi secara alamiah, tetapi karena adanya keterbatasan dan kendala internal UMKM serta lingkungannya, maka peran aktif pemerintah dalam jangka pendek sangat diperlukan untuk turut langsung dalam pembentukannya melalui penyediaan berbagai fasilitasi yang bersifat stimulan, seperti inkubator dan BDS.

- b. Karena penanganan sentra dan klaster bisnis masih bersifat parsial maka diperlukan :
 - 1) Penyamaan visi dan definisi di kalangan instansi pemerintah dan stakeholder;
 - 2) Penyusunan model koordinasi yang terintegrasi dan komprehensif dari tingkat kebijakan sampai tingkat Implementasi;
 - 3) Pemetaan agribisnis Unggulan;
 - 4) Identifikasi klaster unggulan;
 - 5) Pengembangan klaster agribisnis
- c. Untuk jangka panjang pemerintah harus menyediakan prasarana dan sarana, serta iklim yang kondusif dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan antara lain : UU Usaha Mikro dan Usaha Kecil, UU Persaingan Usaha, UU Perbankan dan UU Penanaman Modal; penyediaan prasarana dan sarana, seperti : jalan, irigasi, listrik dan telepon.

8. Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kecil.

Adapun beberapa rangkuman hasil diskusi adalah :

- a. Pemberdayaan UKMK yang telah banyak dilakukan selama ini pengaruhnya secara sosiologis belum pernah dikaji secara khusus.
- b. Pengkajian dampak program pemberdayaan UKMK secara sosiologis terhadap pelaku usaha dan lingkungan masyarakat perlu dilakukan guna melihat sejauhmana berpengaruh atau merubah perilaku dan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
- c. Target penumbuhan 70.000 unit koperasi yang berkualitas dan 6 juta unit UMKM tidak boleh dipandang hanya merupakan sasaran mengejar “angka pertumbuhan” dari sudut pandang ekonomi semata tetapi juga harus bisa menjadi awal dari proses pembangunan sosial masyarakat yang mantap kedepan.
- d. Untuk mendukung pemberdayaan koperasi dan UKMK dalam satu kesatuan pembangunan nasional diperlukan studi yang bersifat sosiologis-antropologis untuk melihat dampaknya dalam kehidupan masyarakat.

- e. Deputi Pengkajian akan melakukan beberapa kajian dalam konteks sosiologis dalam program tahun anggaran 2007 berkerjasama dengan Departemen Sosiologi Universitas Indonesia.
- f. Beberapa rancangan kegiatan yang telah dibahas disepakati untuk dipertajam sesuai dengan masukan selama diskusi untuk selanjutnya dapat dituangkan menjadi proposal kajian.

Pendataan Koperasi yang Responsif Gender

Pendataan Koperasi yang Responsif Gender merupakan kegiatan pendataan terhadap koperasi khususnya Koperasi Wanita di Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan koperasi wanita secara kuantitatif dan kualitatif. Kegiatan dilaksanakan karena pendataan koperasi wanita yang ada pada saat ini belum cukup untuk memberikan gambaran yang akurat dan valid dalam rangka pembinaan koperasi lebih lanjut. Data koperasi wanita aktif yang diinput pada tahun 2005 adalah 737 unit tersebar di 30 propinsi yang meliputi nama, badan hukum, alamat dan klasifikasi Koperasi Wanita.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi wanita, diperlukan pendataan ulang terhadap koperasi yang responsif gender khususnya Koperasi Wanita di 30 propinsi.

Sasaran kegiatan ini adalah :

- Tersusunnya profil Koperasi Wanita di daerah kajian.
- Bahan masukan bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan peran wanita melalui koperasi.

Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Secara kuantitatif jumlah koperasi wanita yang tersebar pada 31 Dinas Koperasi dan UKM di Indonesia (NAD, Sumut, Riau, Jambi, Sumbar, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, D.I. Yogyakarta, Jatim, Bali, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kalbar, NTB, NTT, Sulsel, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Sulbar, dan Papua), adalah 1.517 unit.
2. Secara umum hasil analisa data kuantitatif dan kualitatif terhadap koperasi wanita adalah bahwa Peranan Koperasi Wanita di Indonesia memberi keuntungan bagi anggota dan lembaganya antara lain dalam hal penyerapan tenaga kerja. Melalui kopwan perempuan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas diri. Kegiatan kopwan mampu memberikan kepada kebutuhan perempuan secara lebih luas, peningkatan ekonomi kesehatan reproduksi, peningkatan kualitas pendidikan anak-anak anggota koperasi serta kesehatan keluarga. Namun demikian cukup banyak masalah yang dihadapi oleh kopwan misalnya, dalam sistem kaderisasi, adopsi teknologi, ketergantungan kepada pemerintah dan lain-lain.

3. Rekomendasi yang berhasil diperoleh antara lain bahwa :
 - a. Pendataan koperasi wanita yang akurat sulit diperoleh. Untuk kepentingan perkembangan Koperasi Wanita di Indonesia sangat penting dibuat format pengisian standar yang seragam untuk semua wilayah.
 - b. Perlu ada koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah di level kabupaten maupun propinsi. Perlu penataan birokrasi sehingga pembinaan koperasi benar-benar ditangani oleh individu yang profesional dan kompeten.
 - c. Melalui sistem pendataan yang sistematis dan baik, diharapkan perhitungan keuangan koperasi wanita (rentabilitas, solvabilitas, dan likuiditas) akan terhitung secara akurat. Data tersebut sangat berharga bagi pemerintah untuk menjadi data basis bagi penetapan suatu kebijakan bagi pembinaan kopwan.
 - d. Kopwan membutuhkan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan koperasi dan pengembangan usaha secara profesional.
 - e. Pengembangan usaha kopwan idealnya tidak saja dikaitkan dengan kebutuhan peranan perempuan tetapi juga dikaitkan dengan pengembangan hobi anggota kopwan.
 - f. Dalam implementasi sistem tanggung renteng bagi Kopwan harus dibarengi dengan sistem asuransi bagi anggota Kopwan dalam hal ini perlu dibangun lembaga payung bagi Kopwan ditingkat propinsi atau pusat yang berfungsi sebagai penjamin bagi Kopwan yang berada di bawahnya.
 - g. Perlu dilakukan pendampingan yang berkaitan dengan sistem kaderisasi didalam Kopwan.
 - h. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan pemberian bantuan secara selektif dengan cara memberikan bantuan (bentuk apapun juga) kepada Kopwan yang belum mendapatkan bantuan atau dengan alternatif lain, 1 koperasi mendapat bantuan tidak lebih dari 2 jenis bantuan.
 - i. Kepada peneliti, pemerhati, dan akademisi untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai hasil referensi untuk penelitian selanjutnya demi perbaikan lembaga ekonomi di Indonesia khususnya yang bersifat mikro.